



PENGELOLAAN UTANG NEGARA

Diskusi

**“Pengaruh Utang terhadap Perekonomian Nasional
(Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran)”**

Agustus 2017

**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.**



Outline

I. Tantangan Pembangunan Indonesia

- ▣ IPM Indonesia Relatif Rendah
- ▣ Terdapat Gap Infrastruktur

II. Pemanfaatan Utang

- ▣ Utang untuk Belanja Produktif
- ▣ Capaian output prioritas
- ▣ Angka kemiskinan dan pengangguran

III. Strategi Pengelolaan Utang

- ▣ Siklus pengelolaan Utang
- ▣ Proyeksi target pengelolaan utang

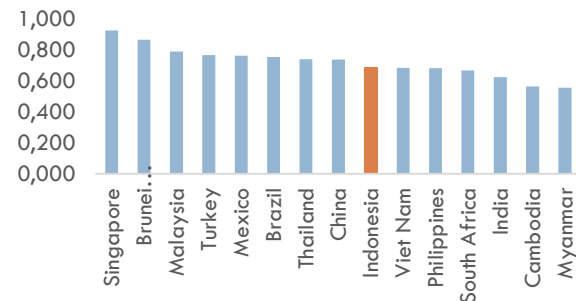


I. Tantangan Pembangunan Indonesia

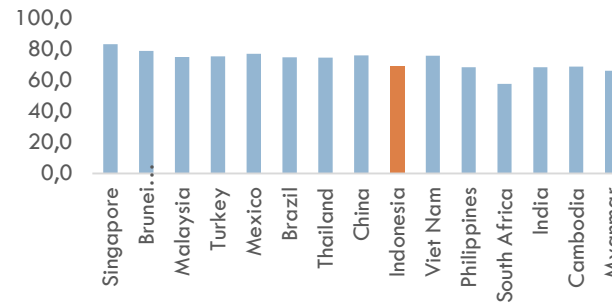
IPM Indonesia Dibandingkan Negara Lain (2015)

... diperlukan peningkatan belanja kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan IPM

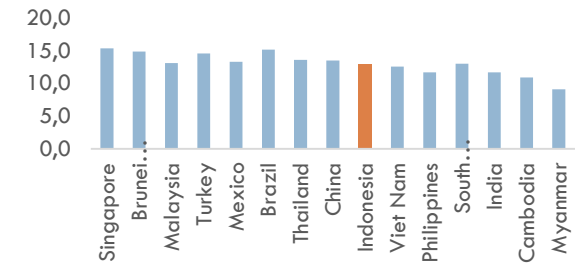
Human Development Index (HDI)



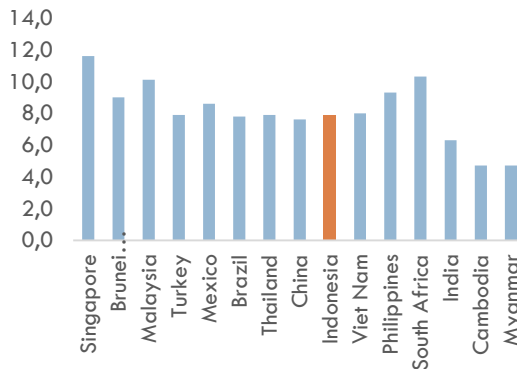
Life expectancy at birth



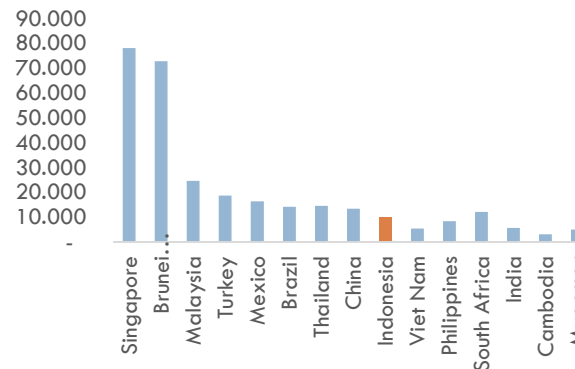
Expected years of schooling



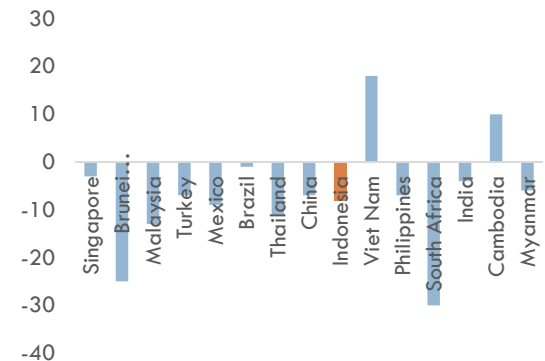
Mean years of schooling



Gross National Income (GNI) per capita



GNI per capita rank minus HDI rank

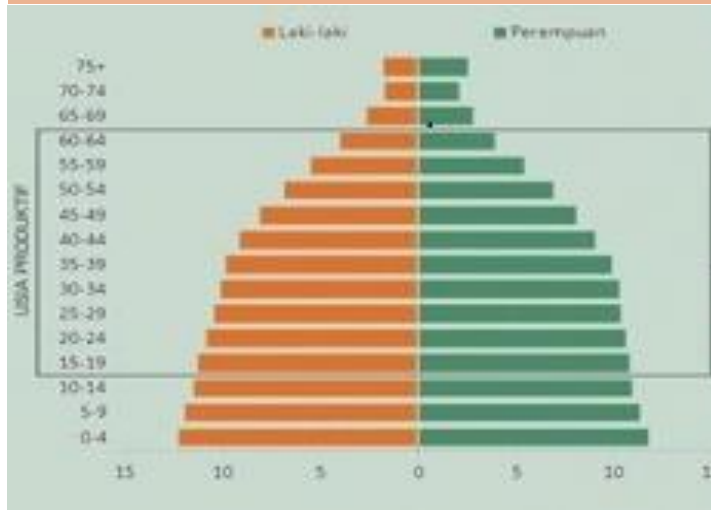


Sumber: CEIC, World Bank, Kementerian Keuangan, BPS, (diolah)

Pembangunan Manusia Indonesia (2015)

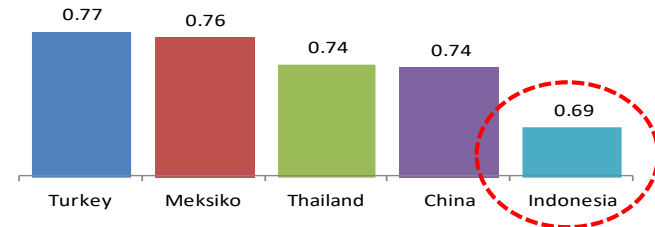
...bonus demografi belum dimanfaatkan optimal

73% Demografi usia produktif

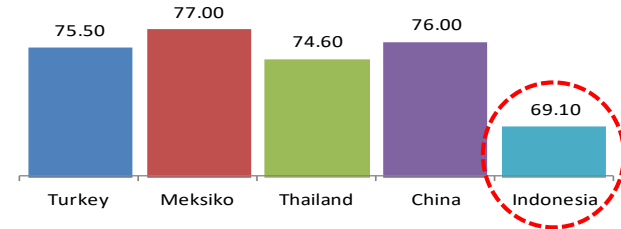


Kondisi terkini Indonesia VS negara peers

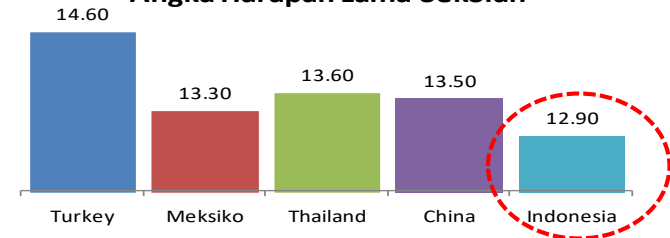
Indeks Pembangunan Manusia



Angka Harapan Hidup



Angka Harapan Lama Sekolah



Indonesia masih tertinggal baik dalam hal harapan hidup, pendidikan dan pembangunan manusia secara umum.

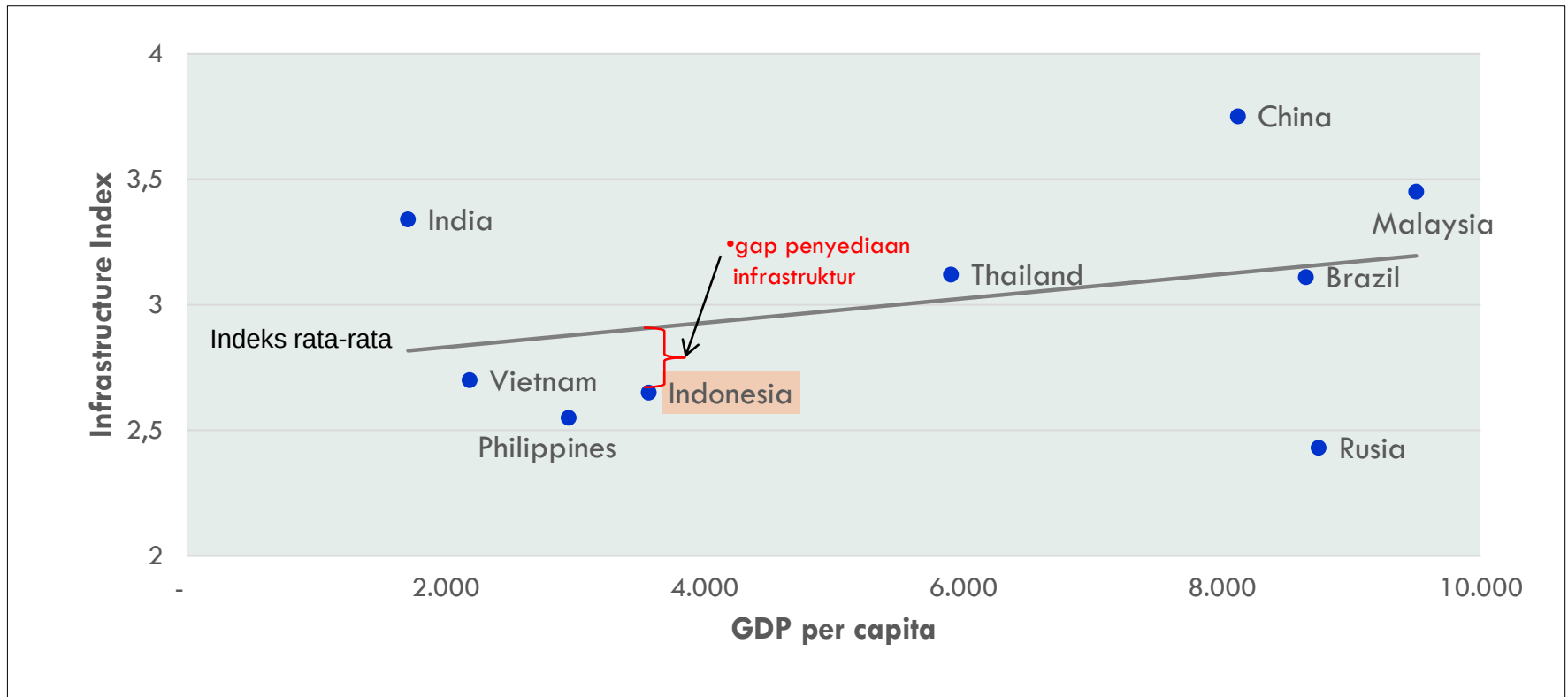
- Sesuai proyeksi, Indonesia akan menikmati masa awal bonus demografi, dengan 73% dari populasi berada pada usia produktif (15-64 tahun).
- Bonus demografi menjadi modal kemajuan ekonomi bila didorong peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah mengejar ketertinggalan bidang pendidikan dan kualitas kesehatan, antara lain melalui:

- (1) Program Keluarga Harapan (PKH) memberi ruang bagi keluarga penerima manfaat untuk mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan;
- (2) konsep *universal coverage*; (a) pemberian jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dan (b) *universal health coverage* untuk peningkatan fasilitas layanan.

Indeks Infrastruktur 2016

... diperlukan usaha pemerintah yang lebih besar untuk menutup gap penyediaan infrastruktur



- Penyediaan infrastruktur Indonesia masih di bawah rata-rata negara lain yang setara.
- Pembangunan infrastruktur perlu diakselerasi untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- Untuk penyediaan layanan infrastruktur baru selama 5 tahun dari 2015-2019 dibutuhkan kurang lebih dana sebesar Rp4.796,2 triliun. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 41,25% yang bisa dicukupi dari APBN/APBD.



II. Pemanfaatan Utang

Pemanfaatan utang yang produktif akan meringankan generasi mendatang

Potensi

Sumber utang: efisien dan risikonya rendah (*cost of borrowing*-nya rendah)

Pemanfaatan: kegiatan produktif



Risiko

Sumber utang: kurang efisien dan risikonya tinggi (*cost of borrowing*-nya tinggi)

Pemanfaatan: kurang produktif

1. Utang untuk Investasi (*Golden rule*);
2. Utang untuk investasi **mendorong produktifitas lebih tinggi dibanding risikonya**;
3. Utang untuk investasi **dapat memenuhi keadilan antar generasi** karena akan mewariskan aset bagi generasi mendatang

Instrumen Utang dan Penggunaannya

... sebagian besar utang digunakan untuk menutup defisit APBN (*general financing*)

General Financing

- SUN (UU No.24/2002)
- SBSN (UU No.19/2008)

SBN

Berupa Obligasi Negara, Sukuk, dan SPN/S

Pinjaman Tunai

Berupa Pinjaman Program dan pinjaman tunai lainnya

Project Financing

Pinjaman Luar Negeri Kegiatan

- Digunakan langsung membiayai proyek/ kegiatan K/L
- Berasal dari lembaga multilateral, bilateral dan kreditur komersial

Pinjaman Dalam Negeri

- Digunakan langsung membiayai proyek/kegiatan K/L terutama POLRI dan Kemenhan
- Fokus pada penyediaan Alamsus dan Alutsista

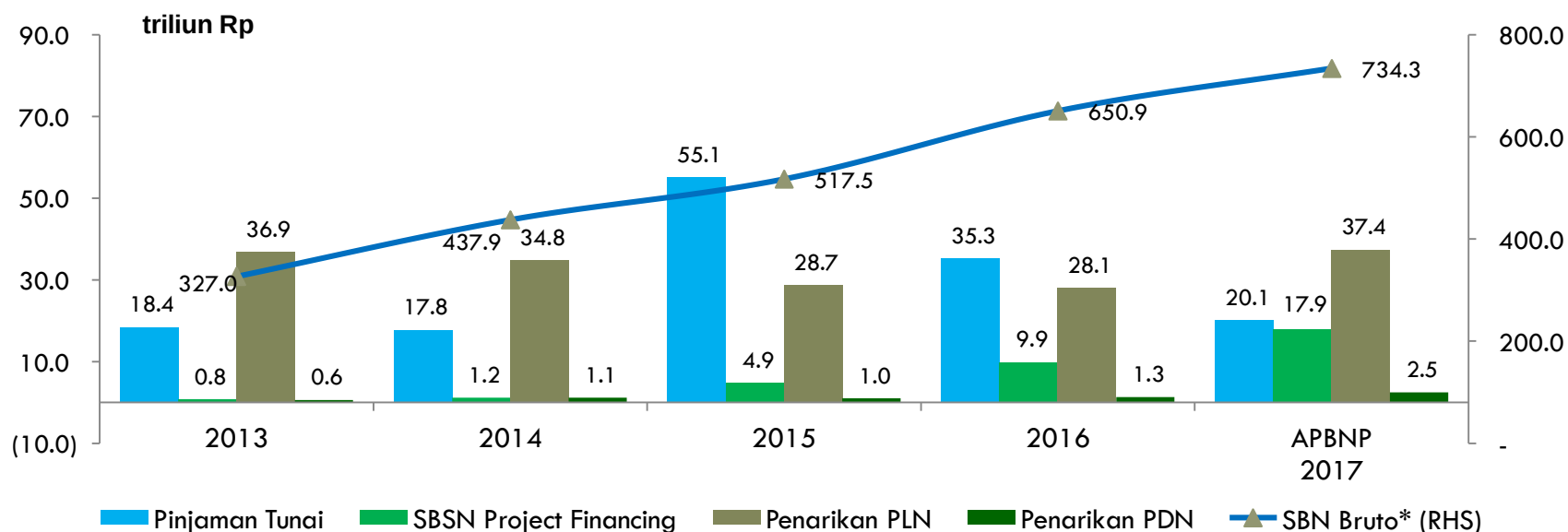
SBSN Project Financing

- Digunakan langsung membiayai proyek/kegiatan K/L terutama Kemen PU Pera, Kemenhub, dan Kemenag
- Fokus pada infrastruktur fisik

Postur Pembiayaan Utang APBN-P 2017

Uraian	APBN-P 2017 (miliar Rp)
<i>SBN (Bruto)</i>	747.343
Penerbitan SUN	550.093
Penerbitan SBSN	197.250
<i>Pembayaran pokok dan bunga SBN</i>	(280.028)
SBN Neto	467.314,3
Pinjaman (Neto)	(5.970,7)
Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	1.733,0
Penarikan	2.500,0
Pembayaran cicilan pokok	(767,0)
Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	(7.703,7)
Penarikan	57.500,3
Pinjaman Tunai	20.100,0
Pinjaman Kegiatan	37.400,3
Pembayaran Cicilan Pokok	(65.204,0)
Total	461.343,6

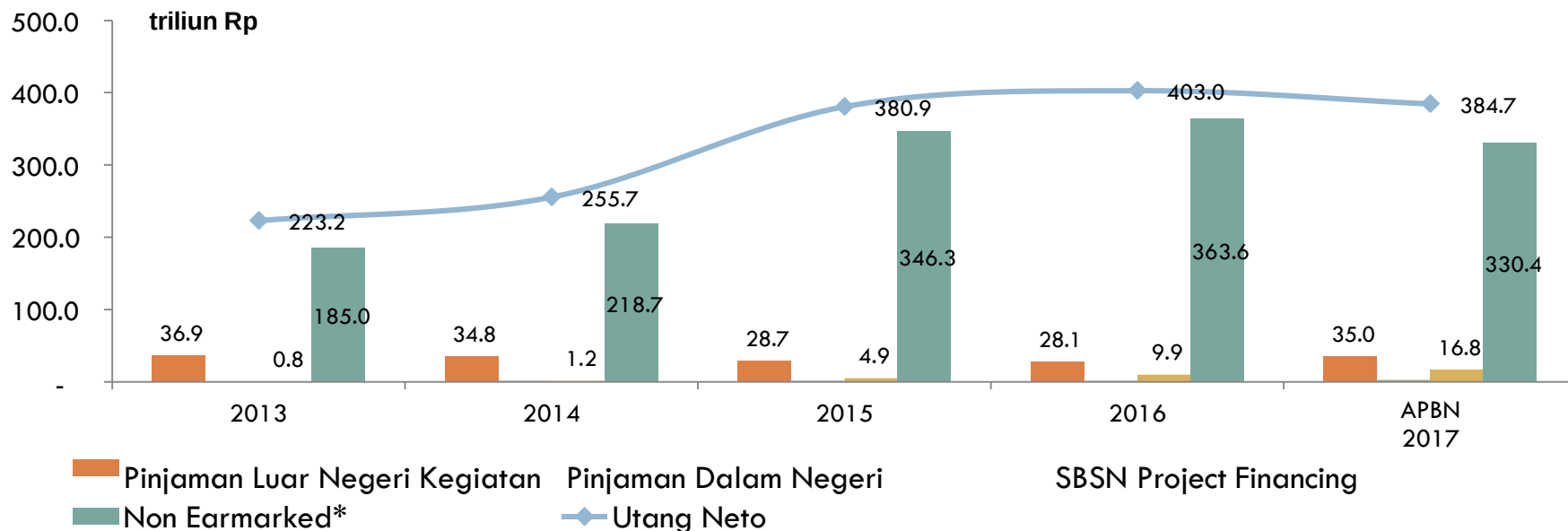
Pembiayaan Utang



* SBN bruto tidak termasuk SBSN Project Financing

Uraian	2013	2014	2015	2016	APBNP 2017
SBN (Neto)	224.672,5	264.628,9	362.257,0	407.259,4	467.314,3
Pinjaman	(1.450,2)	(8.896,6)	18.659,1	(4.250,1)	(5.970,7)
Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	474,4	949,9	832,4	1.051,6	1.733,0
1. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	615,7	1.091,2	973,7	1.334,7	2.500,0
2. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(141,3)	(141,3)	(141,3)	(283,2)	(767,0)
3. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	55.279,8	52.574,7	83.821,3	63.424,4	57.500,3
a. Pinjaman Tunai	18.426,4	17.777,0	55.084,7	35.324,9	20.100,0
b. Pinjaman Kegiatan	36.853,4	34.797,7	28.736,5	28.099,4	37.400,3
i. Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat	32.972,9	32.292,1	26.160,1	22.981,5	29.684,2
ii. Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda	3.880,6	2.505,6	2.576,4	5.117,9	7.716,1
4. Pembayaran Cicilan Pokok	(57.204,4)	(62.421,2)	(65.994,6)	(68.726,0)	(65.204,0)
JUMLAH	223.222,3	255.732,3	380.916,1	403.009,3	461.343,6

Penggunaan Utang Earmaked dan Non Earmarked (2013-2017)



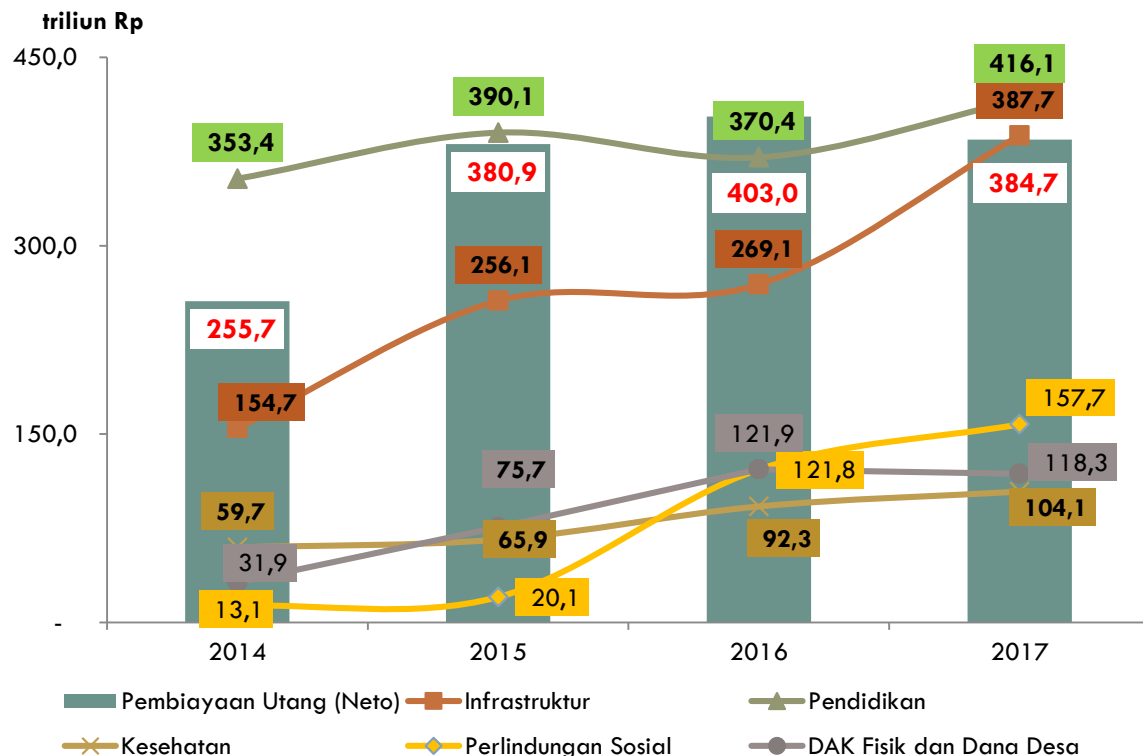
* Utang non earmarked meliputi SBN dan Pinjaman Tunai

	2013	2014	2015	2016	APBN 2017	Kumulatif 2013 - 2017
Utang Neto	223,2	255,7	380,9	403,0	384,7	1.647,5
Earmarked	38,2	37,0	34,6	39,4	54,3	203,5
Pinjaman Luar Negeri Kegiatan	36,9	34,8	28,7	28,1	35,0	163,5
Pinjaman Dalam Negeri	0,6	1,1	1,0	1,3	2,5	6,5
SBSN Project Financing	0,8	1,2	4,9	9,9	16,8	33,5
Non Earmarked*	185,0	218,7	346,3	363,6	330,4	1.444,0

Pemanfaatan Utang untuk Sektor Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial, DAK Fisik dan Dana Desa

Dalam periode 2014-2017 pembiayaan utang (neto) meningkat sejalan dengan kebijakan ekspansif Pemerintah dalam pembangunan program prioritas terutama pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan terutama mulai tahun 2015.

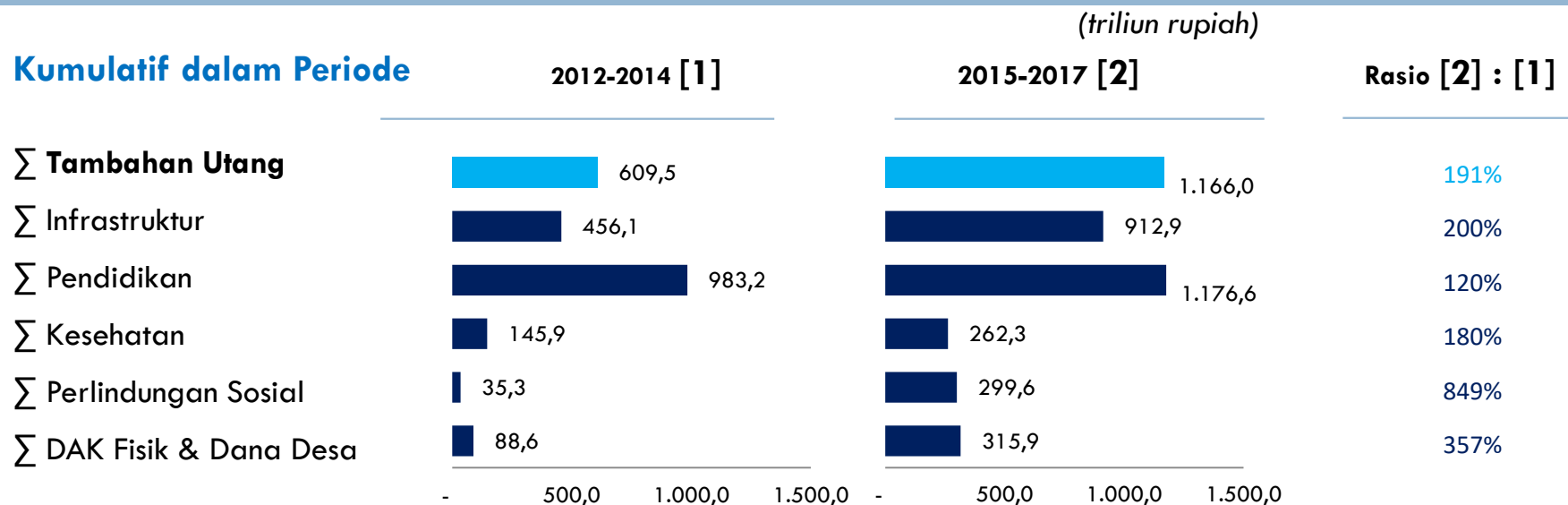
Perkembangan Pembiayaan Utang (neto), Anggaran Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial, DAK Fisik dan Dana Desa



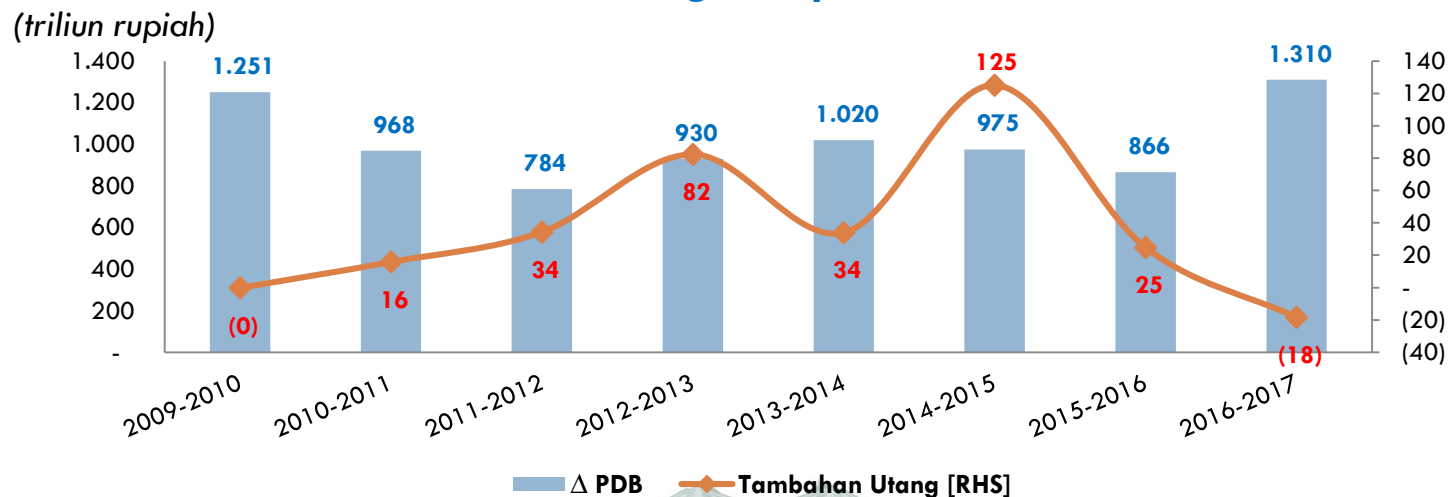
1. Realisasi belanja infrastruktur tumbuh signifikan terutama mulai tahun 2015.
2. Pemerintah juga memanfaatkan utang untuk pemenuhan belanja pendidikan dan kesehatan yang masing-masing tetap dijaga 20 persen dan 5 persen terhadap APBN.
3. Peningkatan utang memungkinkan Pemerintah untuk menambah alokasi belanja DAK Fisik dan Dana Desa serta Perlindungan Sosial.

Utang untuk Peningkatan Produktivitas 2012-2017

...dalam periode 2015-2017, belanja Pemerintah untuk lebih agresif terutama untuk infrastruktur, perlindungan sosial, dan DAK Fisik dan Dana Desa



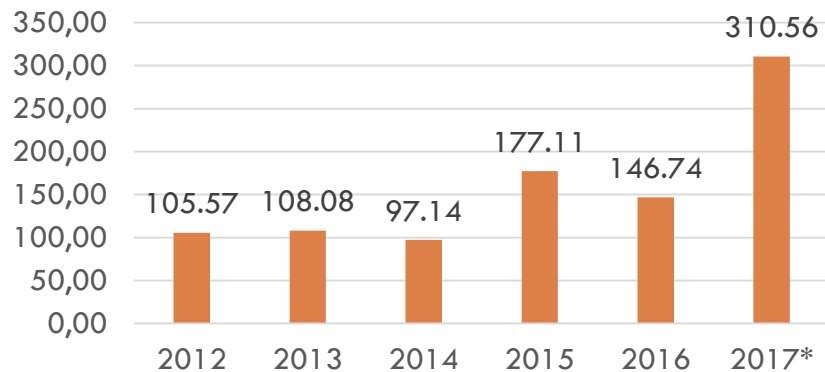
Tambahan utang dan pertumbuhan PDB



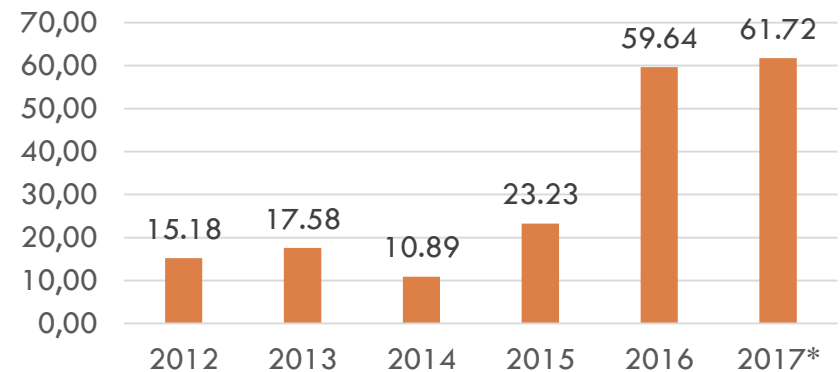
Belanja Pemerintah berdasarkan Fungsi

Belanja Pemerintah untuk fungsi-fungsi penunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan menunjukkan tren yang meningkat. Peningkatan signifikan terutama pada fungsi ekonomi, kesehatan, dan perlindungan sosial

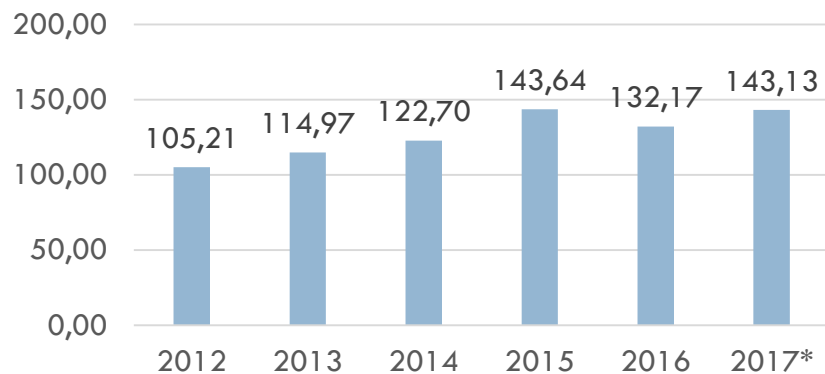
Ekonomi



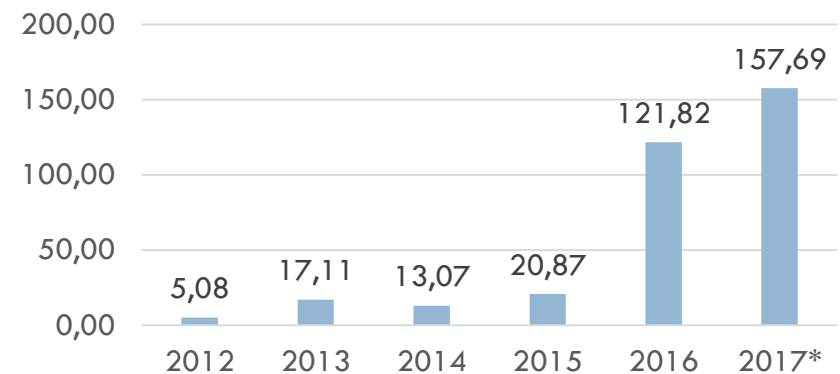
Kesehatan



Pendidikan

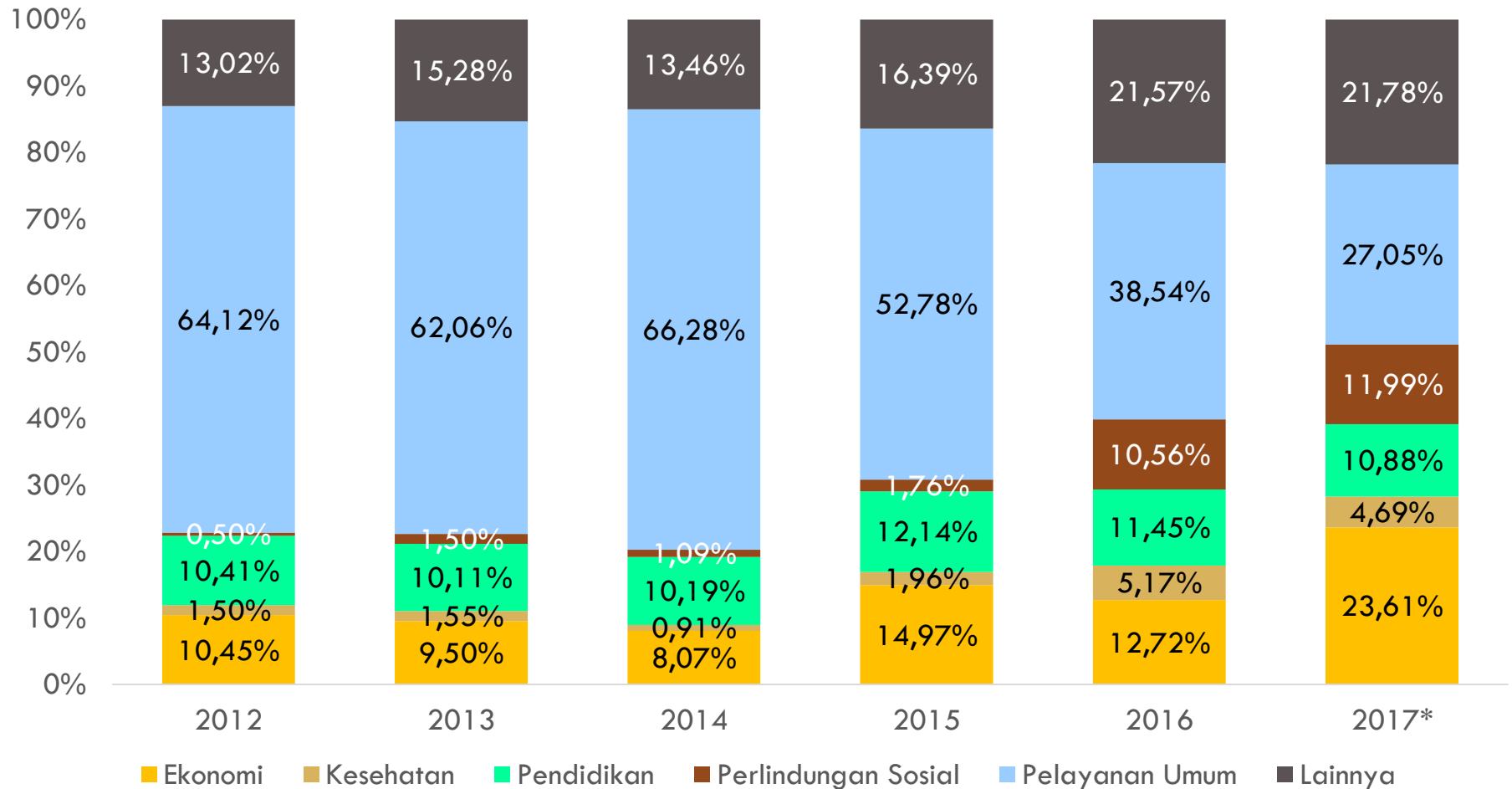


Perlindungan Sosial



Proporsi Belanja berdasarkan Fungsi

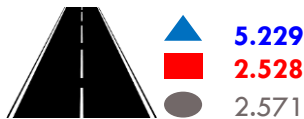
Terdapat kecenderungan peningkatan proporsi belanja untuk sektor/fungsi yang mendukung peningkatan kesejahteraan sosial



Sumber: DJA, Kementerian Keuangan

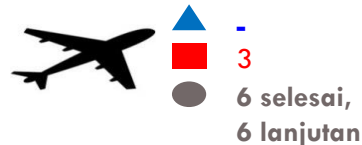
Beberapa Capaian Output Prioritas Sektor Infrastruktur (2015 – 2017)

Jalan (km)



Rekonstruksi, Pelebaran, Pembangunan, (tidak termasuk jalan tol)

Bandara



Pembangunan baru, beberapa dalam proses

Bendungan



Baru dan On Going

Jalur Kereta Api (km'sp)

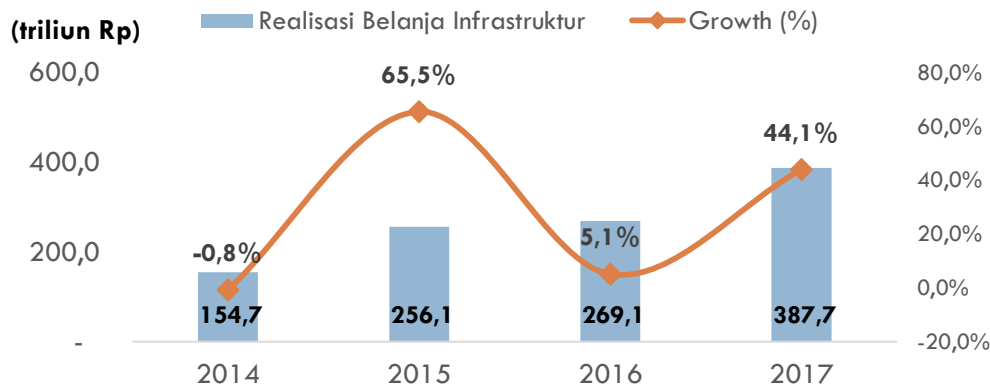


Pembangunan baru (3.258 km'sp hingga 2019), tidak termasuk LRT Sumsel dan Jabodebek)

Perumahan (ribu unit)



Pembangunan Rusun, Rumah Khusus, dan Rumah Swadaya serta peningkatan kualitas Rumah Swadaya



Beberapa Capaian Output Prioritas Sektor Pendidikan (2015 – 2016)

Kartu Indonesia Pintar (juta siswa)



▲ 20,5
■ 20,7

(Kemenag dan Kemendikbud)

Beasiswa Bidikmisi (ribu siswa)



▲ 274,5
■ 324

(Kemenag dan Kemenristekdikti)

Ruang kelas (ribu kelas)



▲ 21,6
■ 28,4

(baru dan rehab)

(Kemenag dan Kemendikbud)

BOS (juta siswa)

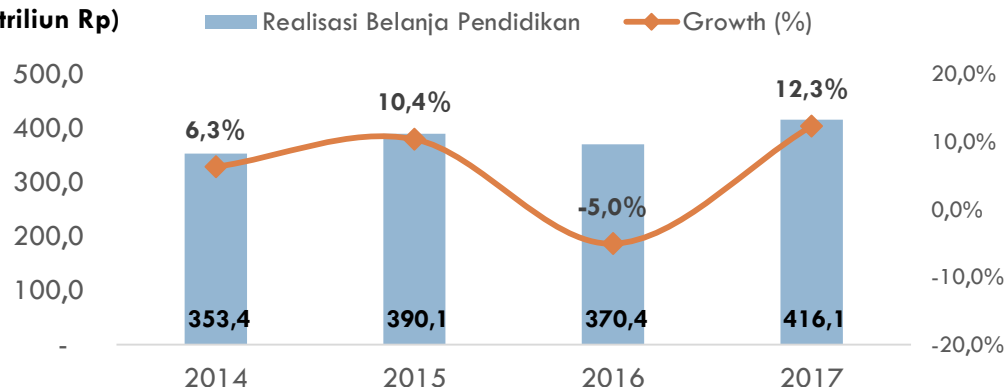


▲ 7,9
■ 8,0

(Kemenag)

▲ Realisasi 2015
■ Realisasi 2016

(triliun Rp)



Anggaran Pendidikan dijaga 20 persen terhadap APBN untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan.

Beberapa Capaian Output Prioritas Sektor Kesehatan (2015 – 2016)

Kartu Indonesia Sehat (PBI) - jiwa



▲ 86,4 juta
■ 91,1 juta

Imunisasi Dasar Lengkap Anak Usia 0-11 bulan (juta bayi)



▲ 3,4
■ 4

Prevalensi stunting (pendek/ sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun)



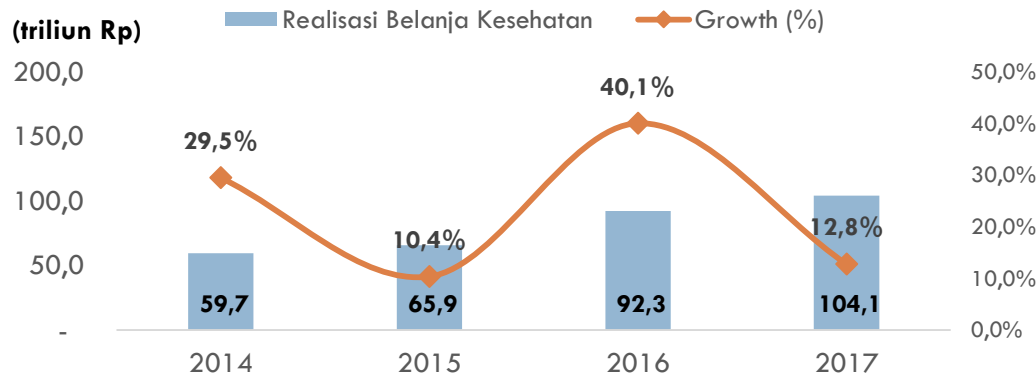
▲ 29,0 %
■ 27,5 %

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas



▲ 77 %
■ 81,5 %

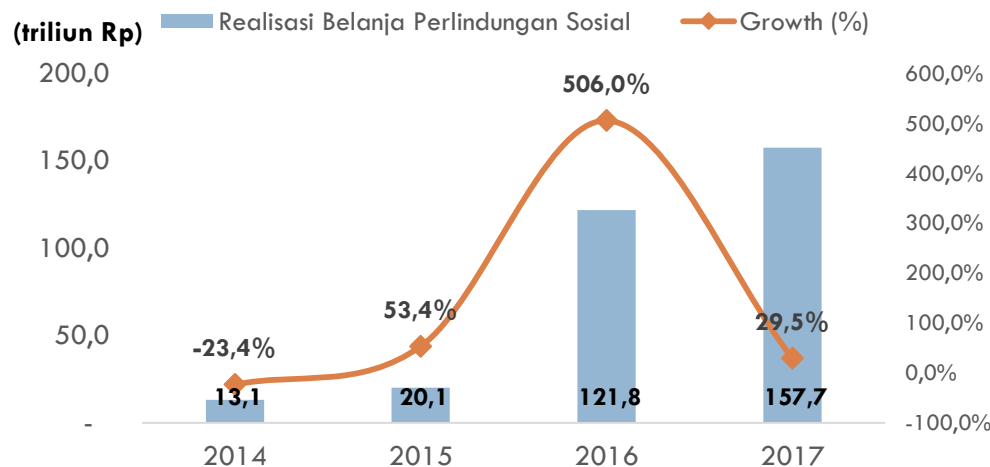
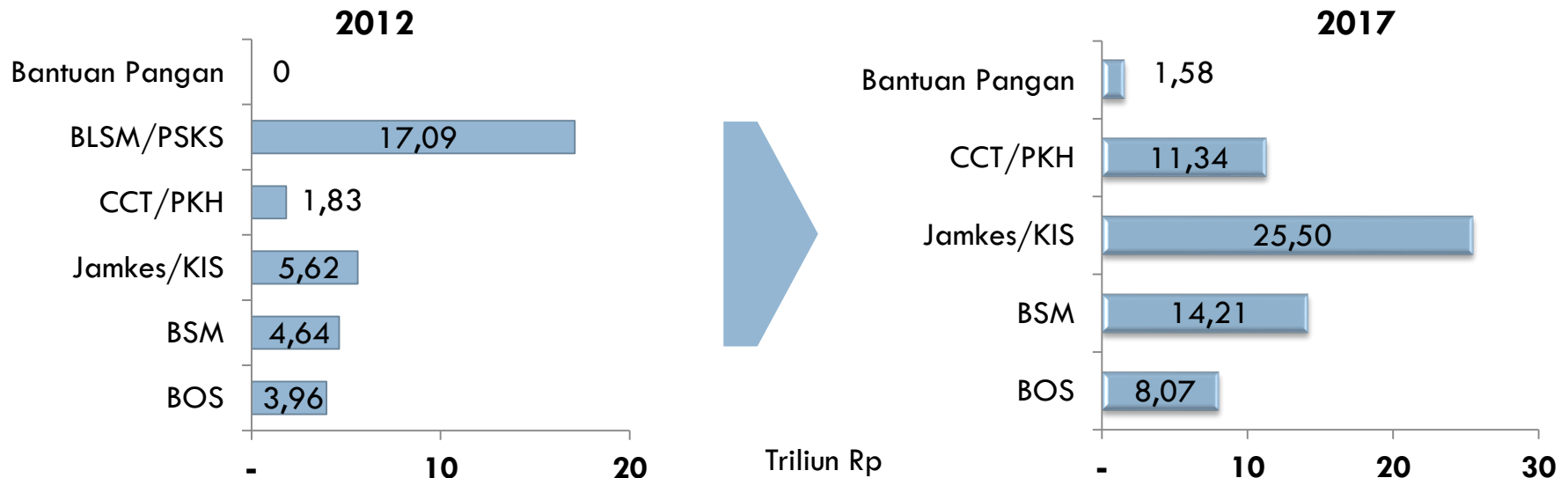
(triliun Rp)



▲ Realisasi 2015
■ Realisasi 2016

Anggaran Kesehatan dijaga 5 persen terhadap APBN untuk meningkatkan *supply side* dan layanan, serta menjaga keberlanjutan JKN.

Beberapa Capaian Output Prioritas Sektor Perlindungan Sosial (2012 – 2017)

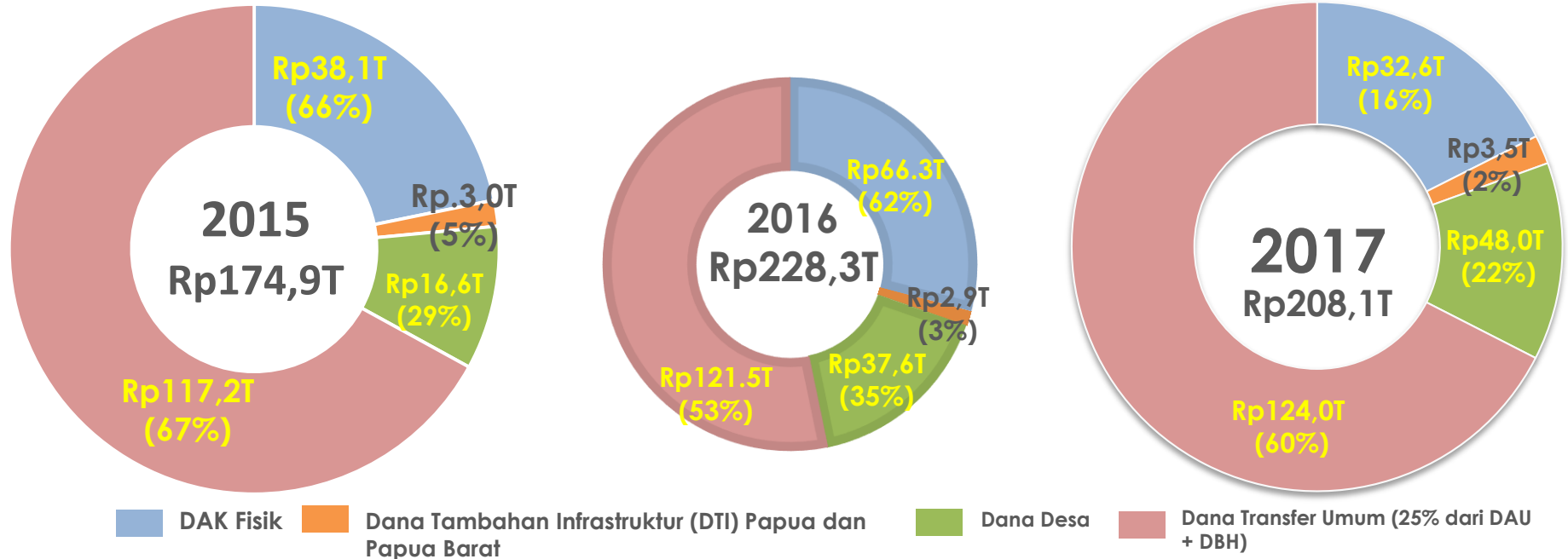


Program Perlindungan Sosial Tahun 2012 – 2017 ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

Program BLSM/PSKS berakhir tahun 2015 dan tidak dilanjutkan karena bersifat temporer dalam rangka mitigasi dampak kebijakan Pemerintah yang menyebabkan kenaikan inflasi.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pembangunan Infrastruktur

...Rata-rata belanja infrastruktur melalui anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebesar 10% dari total belanja APBN (tahun 2015-2017)



TARGET DAK FISIK 2017

Irigasi & Pertanian



- Baru: **5.000 Ha**
- Rehab: **755.200 Ha**
- 10.000 unit embung

Pendidikan



- Rehab kelas: **27.140 unit**
- Ruang Kelas Baru: **3.590 unit**

Jalan



Kondisi Mantap: Provinsi: **71,75%**
Kab/Kota: **60,76%**

Kesehatan



- Rumah Sakit: **453 unit**
- Puskesmas : **5.059 unit**

Perumahan



49.000 rumah Utk masyarakat miskin

Air Minum



- **448 Sambungan Air Minum** bagi **716.352 rumah tangga**.
- Akses air minum layak bagi **688.436 rumah tangga**

Sanitasi



- **169.500** Sambungan RT
- **1.026 unit** IPAL Usaha Skala Kecil
- **348.000 unit** tangki septik individu
- TPS 3R sebanyak **700 unit**

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

...Optimalisasi Dana Transfer untuk mengurangi beban ekonomi dan langsung dinikmati masyarakat

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Rp45,12 T)



- untuk pencapaian program wajib belajar 12 Tahun yg terjangkau & bermutu.
- Sasaran : 46,2 juta siswa SD, SMP, dan SMA/SMK

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (Rp0,29 T)



- untuk mendukung program KB dan penggerakan program KB di Kampung KB dan Posyandu.
- Sasaran: 4.586 balai penyuluhan, 20.470 fasilitas kesehatan, dan 508 kampung KB & Posyandu

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) (Rp3,58 T)



- untuk meringankan beban masyarakat dalam memperoleh akses PAUD.
- Sasaran: 5,6 juta siswa

Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM) (Rp0,1 T)



- untuk meningkatkan kapasitas SDM koperasi dan UKM melalui pelatihan dan pendampingan.
- Sasaran: 23,6 ribu peserta pelatihan

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (Rp6,62 T)



- untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan kesehatan, khususnya pelayanan promotif dan preventif, serta Jampersal.
- Sasaran: 5,3 juta ibu hamil, 12,2 ribu Puskesmas, dan 104 RS

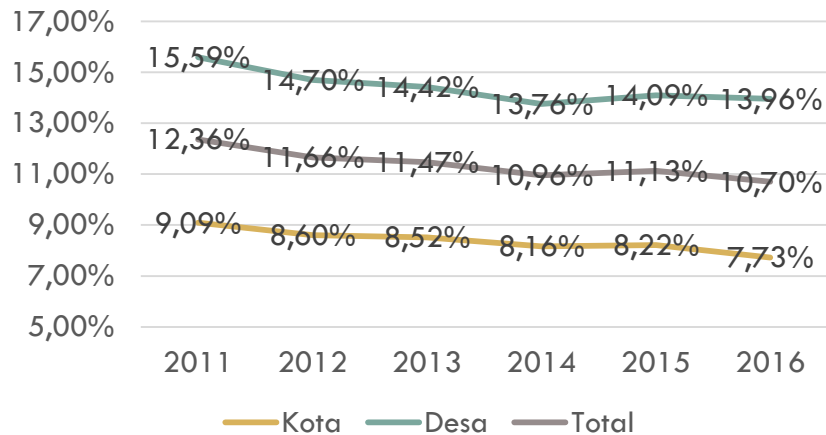
Administrasi Kependudukan (Rp0,75 T)



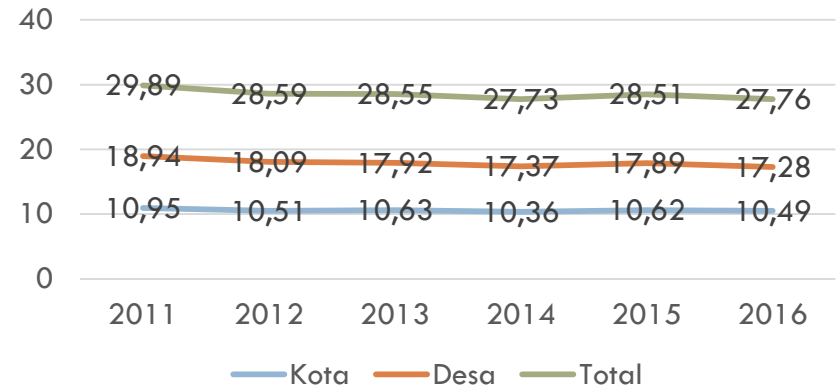
- untuk keberlanjutan dan keamanan sistem administrasi kependudukan (SAK)
- Sasaran: untuk dinas yang menangani dukcapil dan untuk kecamatan

Angka kemiskinan dan Gini ratio 2011 – 2016

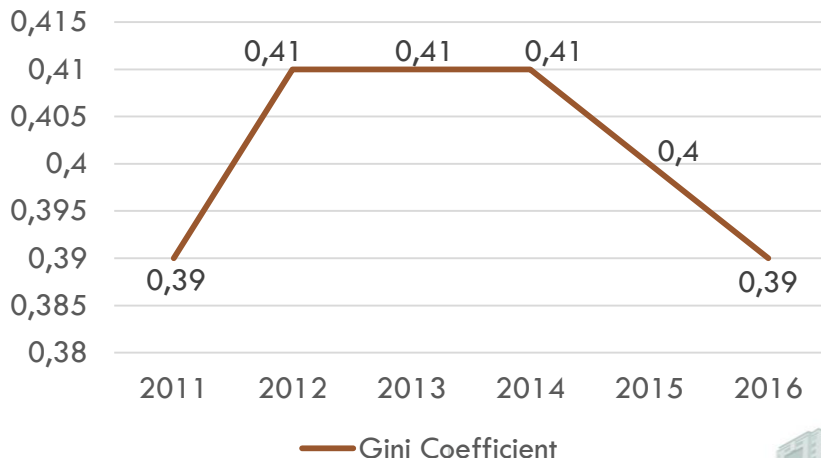
Presentase penduduk Miskin



Jumlah Penduduk Miskin (Juta jiwa)



Gini Coefficient



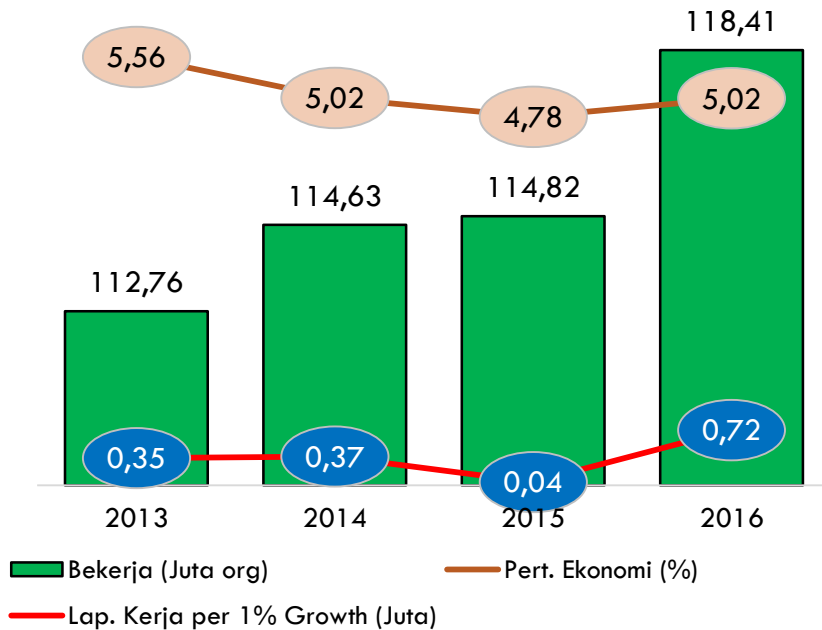
Pertumbuhan utang yang dinilai mampu mengakselerasi pembangunan, berpengaruh pada trend penurunan angka kemiskinan dan Gini ratio.

Secara total, presentase penduduk miskin di tahun 2016 sebesar 10,7% dan Gini ratio sebesar 0,39.

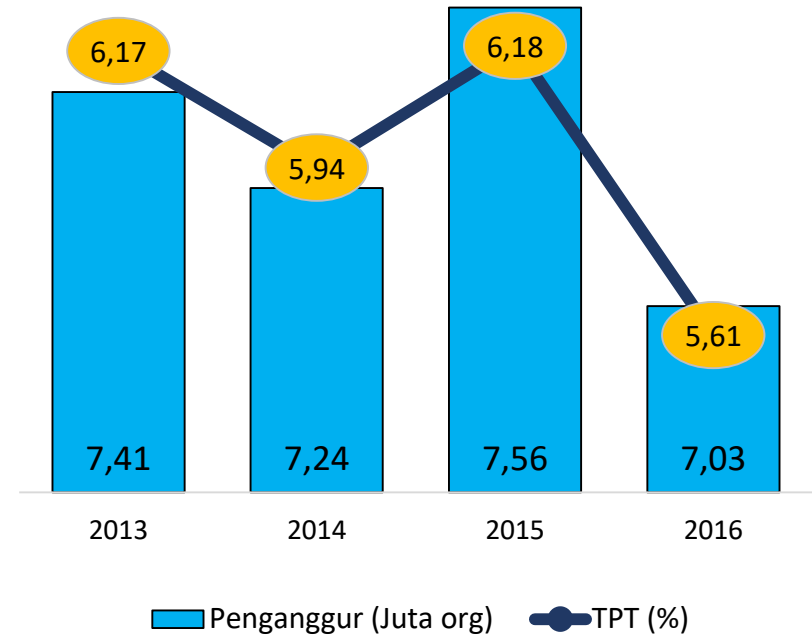
Sumber: BPS

Lapangan Kerja Dalam Kurun 2013-2016

Pertumbuhan Ekonomi Mampu Menciptakan Lapangan Kerja



Jumlah dan Tingkat Pengangguran



Sumber: BPS

- Jumlah orang yang bekerja meningkat dari 112,76 juta orang menjadi 118,41 juta orang selama kurun 2013-2016
- Lapangan kerja juga mengalami tren peningkatan dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016

III. Strategi Pengelolaan Utang

Siklus Pengelolaan Utang

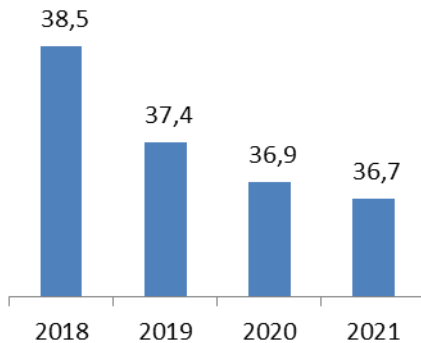
...Pengelolaan utang yang *prudent* mendukung kesinambungan fiskal



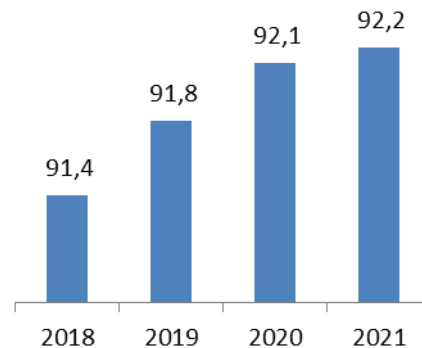
Exercise Target Indikator Risiko dalam 4 Tahun ke Depan (2018-2021)

...secara umum indikator risiko dan biaya utang semakin membaik; rasio debt/GDP dan bunga/GDP menurun, ATM mendekati 7 tahun sebagai dampak kebijakan *shortening duration*

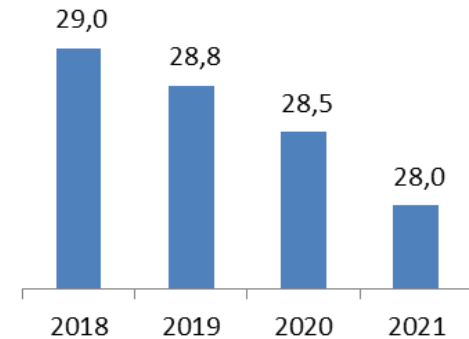
Porsi Utang Valas (%)



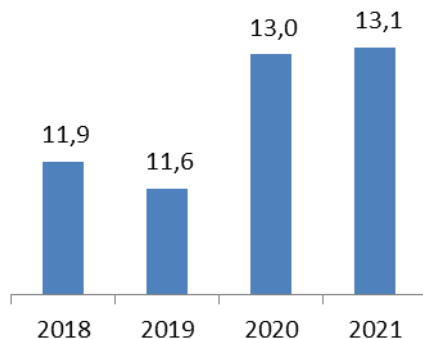
Porsi Tingkat Bunga Tetap (%)



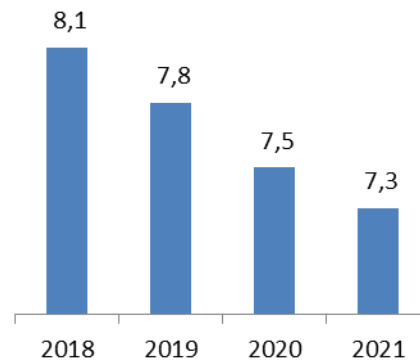
Rasio Utang thd PDB (%)



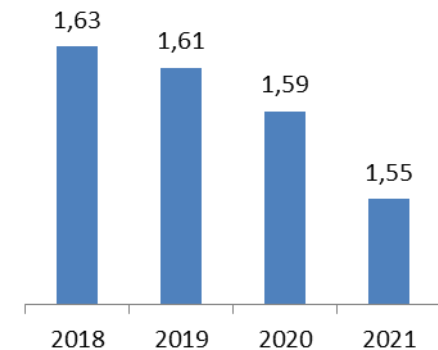
Porsi Utang Jatuh Tempo 1 Tahun (%)



Average Time to Maturity (ATM) (years)



Rasio Pembayaran Bunga Utang thd PDB (%)



Terima Kasih